

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian Terdahulu merupakan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan telah diakui. Penelitian terdahulu merupakan acuan untuk melakukan penelitian kembali dengan tema yang hampir sama atau berbeda dengan tempat yang sama atau berbeda. Peneliti menggunakan empat penelitian terdahulu, yaitu sebagai berikut:

1. Ibrahim Imron dkk (2014), dengan judul penelitian "*Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Kelompok Usaha Bersama (Studi pada Kelompok Usaha Bersama di Desa Dawuhan, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang).*"

Penelitian ini mengkaji Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama di Desa Dawuhan, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dimensi pengembangan kapasitas kelembagaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan pengembangan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Penelitian dilakukan di Desa Dawuhan dengan mengambil sampel 10 Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sebagai objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Desa Dawuhan adalah peternakan sapi, yang merupakan usaha sampingan karena mayoritas masyarakat berprofesi sebagai buruh tani. Perawatan dan pengembangbiakan sapi dilakukan secara terpisah. Upaya penguatan kelembagaan dilakukan dengan meningkatkan intensitas pertemuan dan pembinaan

kepemimpinan kelompok. Administrasi keuangan kelompok sudah bersifat transparan dan akuntabel. Saran untuk peningkatan Usaha Ekonomi Produktif kelompok usaha bersama adalah memperbaiki sistem perawatan dan pengembangbiakan sapi serta pemasaran hasil produksi. Sementara itu, untuk memperkuat kelembagaan, disarankan untuk membentuk unit pengelola keuangan kelompok sebagai sarana pengembangan modal usaha untuk diversifikasi jenis usaha.

2. Anwar Sitepu (2016), dengan judul penelitian "*Analisis Efektivitas Kelompok Usaha Bersama Sebagai Instrumen Program Pengentasan Kemiskinan*"

Penelitian ini berfokus untuk menginvestigasi dua hal: 1) eksistensi dan efektivitas Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sebagai instrumen penanganan fakir miskin, dan 2) faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan atau kegagalan KUBE. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari karya tulis yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah, buku, serta tugas mahasiswa untuk gelar S1, S2, atau S3. Data diperoleh melalui internet menggunakan mesin pencari Google. Hasil pencarian menemukan 15 karya tulis ilmiah, terdiri dari 7 artikel jurnal, 7 buku, dan 4 skripsi, tesis, atau disertasi. Data juga berasal dari laporan hasil evaluasi KUBE yang dilakukan penulis di Kabupaten Katingan pada bulan Mei 2015. Analisis data menunjukkan bahwa eksistensi KUBE di lapangan tidak berlangsung lama dan usaha yang dibangun tidak berkembang. KUBE tidak cukup efektif sebagai instrumen penanganan fakir miskin. Faktor-faktor yang menyebabkan ketidakberhasilan KUBE antara lain: pembentukan KUBE yang bersifat dadakan, minimnya sosialisasi sebelum pelaksanaan kegiatan, pendekatan yang cenderung top-down, ketidaksesuaian jenis usaha dengan sumber daya lokal dan kebiasaan

masyarakat, manajemen usaha yang kurang tepat, pembagian kerja yang tidak adil, jumlah bibit (ternak) yang kurang memadai, kurangnya kualitas pendamping, dan pengawasan yang belum optimal. Kesepuluh faktor tersebut saling terkait satu sama lain. Secara keseluruhan, manajemen pelaksanaan program dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, hingga pengendalian masih memiliki kelemahan yang signifikan.

2. Lutfiah Kharimah (2019), dengan judul penelitian "*Efektivitas Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Sejahtera Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan*".

Penelitian ini mengevaluasi efektivitas Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Sejahtera dalam mengatasi kemiskinan di Desa Caturharjo, Sleman, Sleman, tahun 2016-2017. Ditemukan bahwa meskipun mendapat penghargaan, program tersebut belum berhasil menangani kemiskinan, dengan tingkat kemiskinan tetap tinggi setelah implementasi program. Masalah utama terletak pada penentuan jenis usaha yang tidak sesuai dengan potensi dan minat lokal serta kurangnya kemandirian anggota KUBE. Saran untuk perbaikan meliputi memberikan kebebasan kepada keluarga miskin dalam memilih jenis usaha, memperkuat partisipasi anggota, dan meningkatkan kerjasama di antara mereka. Diperlukan juga upaya untuk mempertahankan jumlah anggota KUBE agar program dapat berjalan secara optimal.

3. Rosmiyani (2018), dengan judul penelitian "*Efektivitas Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin dari perspektif Ekonomi Islam*".

Penelitian ini mengevaluasi efektivitas Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Desa Margomulyo, Kabupaten Tanggamus, dalam mengatasi kemiskinan. Meskipun program telah berjalan selama 3 tahun, masih banyak masyarakat yang belum memahami tujuan program. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas program KUBE, efektivitas program KUBE dalam pemberdayaan masyarakat miskin, dan pandangan Ekonomi Islam tentang program KUBE dalam pemberdayaan masyarakat miskin. Metode penelitian lapangan digunakan dengan data primer diperoleh melalui wawancara, observasi, dan kuesioner, serta data sekunder dari dokumentasi. Populasi adalah 30 anggota KUBE, dan semua anggota dijadikan sampel. Hasil menunjukkan bahwa efektivitas program KUBE hanya memenuhi ketepatan sasaran dan tujuan program, sedangkan tingkat kesadaran dan keinginan untuk berubah masih belum tercapai. Pandangan Ekonomi Islam menilai KUBE hanya memenuhi nilai keadilan dan tafakul. Kesimpulannya, program KUBE di Desa Margomulyo belum sepenuhnya efektif, menyebabkan usaha belum berjalan dengan baik.

Penelitian-penelitian tersebut memiliki fokus yang serupa dalam mengkaji efektivitas Program KUBE dalam mengatasi kemiskinan. Namun, terdapat perbedaan dalam pendekatan, metode, dan kesimpulan yang dihasilkan. Penelitian pertama menyoroti efektivitas KUBE di Desa Caturharjo, menyimpulkan bahwa program belum berhasil menangani kemiskinan karena kurangnya pemahaman tujuan program. Penelitian kedua mengevaluasi program KUBE di Desa Margomulyo dengan hasil serupa, menunjukkan bahwa beberapa ukuran efektivitas dan indikator pemberdayaan masih belum tercapai. Penelitian ketiga, yang juga berfokus pada Desa Caturharjo, menemukan bahwa program KUBE Sejahtera

belum efektif karena kurangnya kemandirian anggota dan penentuan jenis usaha yang tidak sesuai. Sementara itu, penelitian keempat menyimpulkan bahwa program KUBE di Desa Caturharjo belum efektif karena masih tingginya tingkat kemiskinan dan faktor-faktor seperti penentuan jenis usaha yang tidak sesuai dengan potensi lokal. Meskipun memiliki pendekatan dan metodologi yang berbeda, kesemua penelitian ini menyoroti tantangan dalam implementasi program pemberdayaan masyarakat seperti KUBE dalam upaya mengurangi kemiskinan. Perbedaan ke-4 penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki banyak perbedaan baik dari variabel, metode penelitian, teknik-teknik yang digunakan, tempat penelitian dan hasil penelitian. Penelitian yang akan diteliti oleh peneliti berfokus untuk mengkaji terkait pengaruh program KUBE terhadap pengentasan kemiskinan di Kecamatan Cisarua.

Tabel 2. 1 Penelitian terdahulu

No.	Judul Penelitian (Peneliti & Tahun)	Teori yang mendasari	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	<i>Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Kelompok Usaha Bersama (Studi pada Kelompok Uaha Bersama di Desa Dawuhan, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang).</i>  Ibrahim Imron, Mochammad Saleh Soeaidy, Heru Ribawanto (2014).	Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 1. Pembangunan menurut Nazution yang menjelaskan bahwa pembangunan merupakan usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya. 2. Pemberdayaan menurut Aziz (2005:135).	Kualitatif, dan disajikan secara Kualitatif Deskriptif.	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Dawuhan dimulai dari tahap pembentukan, dilanjutkan dengan praktik, dan tahap terakhir adalah pemberian bantuan. Beberapa masalah terkait dengan faktor penghambat KUBE termasuk kesadaran minoritas anggota yang masih rendah, dualisme pekerjaan pendamping lapangan, kondisi budaya dan lingkungan di luar Desa Dawuhan, serta kurangnya kualitas pengawasan pemerintah di lapangan.
2.	<i>"Analisis Efektivitas Kelompok Usaha Bersama Sebagai Instrumen Program</i>	Teori yang mendasari penelitian ini adalah teori Efektivitas dari Sedarmayanti yang menjelaskan bahwa efektivitas merupakan suatu	Kualitatif, untuk menganalisis efektivitas program KUBE sebagai	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tidak efektif sebagai instrumen dalam mengatasi kemiskinan. Hal tersebut disebabkan oleh tahapan pelaksanaan yang diatur dalam

	<p><i>Pengentasan Kemiskinan</i>” (Socio Informa Vol. 2, No. 01, Januari - April, Tahun 2016. Kesejahteraan Sosial).</p> <p>Anwar Sitepu (2016)</p>	<p>ukuran yang memberikan seberapa jauh tujuan dapat dicapai.</p>	<p>instrumen program pengentasan kemiskinan.</p>	<p>Pedoman KUBE tidak dilakukan dengan konsisten, sehingga KUBE yang terbentuk tidak tangguh. Bahkan, bantuan tambahan seperti Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) juga diberikan kepada KUBE yang tidak memenuhi syarat, menunjukkan adanya masalah dalam manajemen program.</p>
3.	<p><i>”Efektivitas Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Sejahtera Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan”</i></p> <p>Lutfiah Karimah (Skripsi 2019)</p>	<p>Teori yang diunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indikator efektivitas menurut Sutrisno (2007:125-126) yaitu pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan dan perubahan nyata.</li> <li>2. Teori tentang kemiskinan dari Kuncoro (2003).</li> <li>3. Teori tentang Program KUBE.</li> </ol>	<p>Kualitatif deskriptif, untuk mengetahui secara mendalam terkait efektivitas program KUBE.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Desa Caturharjo tidak efektif dalam mengatasi kemiskinan. Hal ini terlihat dari masih tingginya angka kemiskinan di desa tersebut, yang menunjukkan bahwa program KUBE belum berhasil menjangkau sasaran utamanya, yaitu masyarakat miskin. Rata-rata dari penerima bantuan tidak memiliki pengalaman dan kemampuan dalam membangun usaha, kurangnya partisipasi masyarakat, dan mayoritas penerima bantua KUBE tidak memiliki modal untuk pengembangan usaha setelah mendapatkan bantuan KUBE.</p>

4.	Rosmiyani (2018). <i>Efektivitas Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin dari perspektif Ekonomi Islam</i>	<p>Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 2 teori utama yaitu sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Teori Efektivitas menurut Sutrisno (2007:125-126) yang terdiri dari pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, perubahan nyata.</li> <li>2. Teori Pemberdayaan menurut Suparjan dan Hempri, (2003:43) yang menjelaskan bahwa pemberdayaan memiliki makna membangkitkan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dalam menentukan masa depan mereka.</li> </ol>	Kuantitatif, dengan pendekatan asosiatif untuk menguji hubungan antara variabel.	Berdasarkan penelitian tentang Efektivitas Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin dari perspektif Ekonomi Islam, ditemukan bahwa program tersebut belum sepenuhnya efektif. Hal ini terlihat dari dua indikator efektivitas program yang belum tercapai, yakni sosialisasi program dan pemantauan program. Selain itu, dari empat indikator pemberdayaan masyarakat, hanya satu indikator yang terpenuhi, yaitu tingkat kesadaran dan keinginan untuk berubah. Dalam perspektif Ekonomi Islam, program KUBE juga belum sepenuhnya memenuhi nilai-nilai dasar, karena hanya dua nilai yang terpenuhi, yaitu keadilan dan tafakul (jaminan sosial), sementara nilai tanggung jawab belum terpenuhi. Prinsip pemberdayaan masyarakat seperti ta'awun dan syura juga belum terpenuhi.
----	---	--	--	---



Setelah memeriksa hasil temuan dari beberapa peneliti sebelumnya, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan mengenai Efektivitas Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, dengan beberapa penelitian sebelumnya. Beberapa persamaannya terletak pada praktik pelaksanaan program KUBE yang menunjukkan adanya faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Sementara itu, metode yang digunakan oleh peneliti sebelumnya dan penelitian yang akan dilakukan berbeda karena peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif, dan perbedaan lainnya terletak pada fokus penelitian, di mana belum ada penelitian sebelumnya yang secara khusus meneliti efektivitas Program KUBE, terutama Program KUBE di kecamatan Cisarua. Kecamatan Cisarua memiliki 10 program KUBE yang telah berjalan dan 7 diantaranya berkembang.

## **2.2 Teori yang Relevan dengan Penelitian**

### **2.2.1 Kajian Tentang Efektivitas**

#### **1. Pengertian Efektivitas**

Richard M. Streers mengemukakan bahwa Efektivitas Organisasi (2020:216) mengemukakan bahwa “Efektivitas sebaiknya dipandang sebagai proses yang berkesinambungan dan bukan sebagai akhir.” Konsep efektivitas

tentu memiliki pengertian yang berbeda tergantung pada kerangka acuan yang dipakai. Mardiasmo mengemukakan bahwa “Efektivitas adalah Hubungan antara Output dengan tujuan, dimana kontribusi output berpengaruh terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, semakin besar output yang diberikan maka semakin efektif proses kerja suatu untuk organisasi (Mardiasmo 2017:134).” Perspektif tentang efektivitas bersumber dari salah satu kriteria ilmu administrasi yang berkembang secara alamiah ke dalam berbagai aktivitas kehidupan manusia untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Teori efektivitas digunakan untuk mengkaji berbagai implikasi dari berbagai kegiatan manusia agar dapat menentukan apakah dilakukan secara efektif atau tidak efektif yang mana tidak terlepas dari rasionalitas dan efisiensi (Makmur 2011:6). Makmur dalam efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan (2011:7) menyatakan bahwa Efektivitas adalah “kemampuan melaksanakan tugas, Fungsi (Operasi Kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya dengan tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.”

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu metode untuk mengevaluasi kinerja atau kegiatan masyarakat, suatu organisasi dan lembaga pemangku kepentingan (*Stakeholder*). Efektivitas ini merupakan salah satu penilaian yang dapat menentukan apakah organisasi perlu mengalami perubahan besar dalam bentuk dan manajemennya. Secara

seederhana, efektivitas mengacu pada pencapaian tujuan organisasi, program atau masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efisien. Hal ini melibatkan evaluasi terhadap masukan (input), proses, dan hasil (output). Sumber daya yang dimaksud mencakup personil, fasilitas, dan metode yang digunakan oleh organisasi, program atau masyarakat. Suatu kegiatan dikatakan efisien ketika dilaksanakan sesuai prosedur, sementara efektivitasnya terlihat dari pencapaian hasil yang bermanfaat. Dengan kata lain, sebuah kegiatan dianggap efektif jika sesuai dengan aturan yang ditetapkan atau mencapai target yang telah ditentukan oleh organisasi itu sendiri.

## **2. Unsur-unsur Efektivitas**

Konsep efektivitas suatu program, kegiatan atau organisasi harus memperhatikan beberapa unsur-unsur penting yang mana saling berkontribusi untuk mengkaji dan mengukur bahwa program, organisasi atau kegiatan yang dilaksanakan berjalan efektif. Makmur (2011:7) mengemukakan bahwa dari segi kriteria efektivitas dapat diperhatikan unsur-unsur berikut:

### **1) Ketepatan waktu**

Waktu memiliki peranan krusial dalam keberhasilan aktivitas organisasi. Penggunaan waktu yang tepat meningkatkan efektivitas mencapai tujuan. Menyia-nyiakan waktu akan berakibat pada kegagalan. Penting untuk memanfaatkan waktu dengan bijak karena waktu yang terbuang tidak dapat dikembalikan.

2) Ketepatan perhitungan biaya

Setiap kegiatan, baik individu, organisasi, maupun negara, memerlukan pengelolaan biaya yang tepat. Ketepatan dalam mengalokasikan biaya memastikan kelancaran dan kepuasan semua pihak yang terlibat. Penetapan biaya yang akurat merupakan aspek penting dari efektivitas.

3) Ketepatan dalam pengukuran

Setiap kegiatan memiliki ukuran keberhasilannya. Ketepatan ukuran yang digunakan dalam melaksanakan tugas adalah bagian dari efektivitas. Ketidaksihesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan ukuran yang telah ditetapkan sebelumnya mencerminkan rendahnya efektivitas, tanggung jawab yang harus diemban oleh setiap individu dalam sebuah organisasi

4) Ketepatan dalam menentukan pilihan

Kesalahan dalam memilih pekerjaan, metode, benda, teman, pasangan, dan hal lainnya menandakan ketidakefektifan dan dapat menyebabkan penyesalan di masa depan. Sebaliknya, pemilihan yang tepat akan membawa kebahagiaan dalam perjalanan hidup seseorang. Menentukan pilihan bukanlah hal yang mudah, bukan hanya tentang menemukan yang terbaik atau yang jujur, tetapi juga tentang kesesuaian dengan kebutuhan dan keinginan individu.

5) Ketepatan berpikir

Pemikiran Descartes yang menyatakan "*cogito ergo sum*" (aku berpikir, maka aku ada) menyoroti pentingnya kecerdasan manusia dalam kehidupan. Ketepatan berpikir memainkan peran kunci dalam kehidupan individu dan interaksi dengan alam semesta, yang dapat memberikan dampak baik maupun buruk. Ketepatan berpikir menghasilkan efektivitas, memungkinkan kerjasama yang sukses dan hasil yang optimal.

6) Ketepatan dalam melakukan perintah

Kemampuan seorang pemimpin memiliki dampak besar terhadap keberhasilan suatu organisasi. Salah satu aspek penting adalah kemampuan memberikan perintah yang jelas dan mudah dipahami oleh bawahan. Perintah yang tidak jelas atau sulit dipahami akan menyulitkan pelaksanaannya, bahkan bisa mengakibatkan kegagalan, merugikan organisasi secara keseluruhan.

7) Ketepatan dalam menentukan tujuan

Setiap organisasi, baik pemerintah maupun masyarakat, berusaha mencapai tujuan yang telah disepakati, sering kali diatur dalam dokumen tertulis yang bersifat strategis. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan kegiatan organisasi. Tujuan yang ditetapkan dengan tepat sangat mendukung efektivitas pelaksanaan kegiatan, terutama yang berorientasi pada jangka panjang.

8) Ketepatan sasaran

Tujuan organisasi lebih berfokus pada jangka panjang dan bersifat strategis, sementara sasaran cenderung lebih berorientasi pada jangka pendek dan bersifat operasional. Penetapan tujuan dan sasaran yang tepat, baik secara individu maupun oleh organisasi, sangat penting dalam menentukan keberhasilan aktivitas. Sebaliknya, sasaran yang tidak tepat dapat menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan.

Sutrisno (2010:125-126) mengemukakan bahwa untuk mengukur suatu efektif atau tidaknya suatu program dapat diukur lewat unsur-unsur berikut:

1) Pemahaman Program

Indikator pemahaman program diartikan sebagai realisasi program dapat berjalan dengan lancar. Pemahaman program yang dimaksud adalah tujuan program dan tahapan pelaksanaan proses sangat diperlukan oleh para sasaran program agar dapat berjalan sesuai tujuan.

2) Ketepatan Sasaran

Indikator ketepatan sasaran yang dimaksud yaitu sasaran yang dituju sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan sebelum program berjalan sehingga dapat berjalan dengan efektif.

3) Ketepatan waktu

Ketepatan waktu merupakan indikator pengukuran efektivitas suatu program dengan maksud program berjalan sesuai dengan hasil

perencanaan, dimana tidak kurang dan lebih dari waktu yang telah direncanakan.

4) Tercapainya tujuan

Tujuan dari suatu program tidak hanya berisikan keberhasilan, namun manfaat. Indikator ini tidak hanya mengarah pada keberhasilan suatu program namun juga semakin bermanfaat maka semakin efektif suatu program.

5) Perubahan nyata

Tentunya salah satu indikator yang merupakan penentuan dari efektivitas suatu program yaitu perubahan nyata atau hasil nyata yang menjadi sumbangsih dari program yang sudah dilaksanakan.

### **3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas**

Richard M. Streers (20 20:209-215) mengemukakan bahwa terdapat empat faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas yaitu:

1) Ciri Organisasi

Struktur dan teknologi organisasi dapat mempengaruhi segi-sei tertentu dari efektivitas, dengan berbagai cara. Mengenai struktur ditemukan bahwa meningkatnya produktivitas dan efisiensi meruoakan hasil dari meningkatnya spesialisasi fungsi, ukuran organisasi, sentralisasi pengambilan keputusan, dan formalitas. Teknologi organisasi turut mempengaruhi tingkat efektivitas meski secara tidak langsung, dari

banyaknya pengukuran efektivitas dilapangan menunjukkan bahwa variasi teknologi berinteraksi dengan struktur dalam pengaruhnya terhadap terhadap keberhasilan organisasi, artinya efektivitas dengan sangat jelas sangat diperlancar jika susunan sumber daya organisasi (misalnya mekanis versus organis) sedemikian rupa sehingga paling cocok untuk menangani teknologi yang dipakai. Jika hubungan struktur dan teknologi sudah sama maka resiko terkait masalah yang akan ditemui oleh pekerja menjadi kecil.

## 2) Ciri Lingkungan

Lingkungan luar dan dalam sangat mempengaruhi efektivitas organisasi, yang mana keberhasilan hubungan organisasi dan lingkungan sangat bergantung pada tiga variabel utama yaitu: tingkat keterdugaan keadaan lingkungan, ketepatan persepsi atas keadaan lingkungan, dan tingkat rasionalitas organisasi. Ketiga variabel tersebut mempengaruhi ketepatan tanggapan organisasi terhadap perubahan lingkungan. Semakin tepat tanggapannya, makin berhasil adaptasi yang dilakukan oleh organisasi, oleh karena itu monitoring perubahan lingkungan merupakan salah satu keharusan yang harus dilakukan secara terus-menerus (melalui riset ekonomi dan pasar, nasihat hukum kegiatan politik, dan seterusnya), dan menyesuaikan desain teknologi, sasaran, dan perilaku organisasi menanggapi perubahan-perubahan yang hadir.

## 3) Ciri Pekerja



Para anggota organisasi merupakan salah satu faktor pengaruh efektivitas organisasi, karena perilaku mereka yang dalam jangka panjang akan memperlancar atau merintangi tercapainya tujuan organisasi. Kesadaran akan perilaku, perbedaan pribadi yang dapat terdapat diantara para pekerja sangat penting, artinya karena para pekerja memberikan tanggapan yang berbeda dengan cara yang berbeda atas usaha-usaha manajemen untuk mencapai usaha yang diarahkan ke tujuan. Ketika sudah mengetahui perbedaan tersebut para manajemen dapat menyesuaikan ancahan terhadap pengorganisasian dan kepemimpinan atas pekerja dalam pekerjaan dan dengan demikian meningkatkan kesempatan bekerja sama dan memperbesar dukungan bersama untuk sasaran organisasi. Pada intinya kunci menuju keberhasilan suatu organisasi adalah diakuinya oleh para manajer hubungan tukar-menukar antara organisasi dengan para anggotanya, dimana kedua pihak saling membantu, dan sifat ini bergantung pada usaha memahami mengapa orang bersedia bekerja dan pada hubungan antara usaha kerja mereka dengan efektivitas organisasi.

#### 4) Kebijakan dan Praktik Manajemen

Pada akhirnya telah diidentifikasi beberapa mekanisme khusus alat para manajer meningkatkan efektivitas organisasi. Mekanisme ini meliputi penetapan tujuan strategi, pencarian dan pemanfaatan sumber

daya secara efisien, menciptakan lingkungan prestasi, proses komunikasi, kepemimpinan dan pengambilan keputusan, dan adaptasi dan inovasi kerja.

## **2.2.2 Kajian tentang Program Pemberdayaan Sosial dan Program KUBE**

### **1. Pemberdayaan Sosial (*Social/community development*)**

Zaztrow (2017:50) mengemukakan bahwa:

*“Empowerment is the process of helping individuals, families, groups, organizations, and communities to increase their interpersonal, personal, political, and socioeconomic strengths so they can improve circumstances.”*

Zaztrow mengemukakan bahwa “Pemberdayaan merupakan proses pertolongan terhadap individu, keluarga, organisasi dan komunitas agar bisa meningkatkan kemampuan mereka secara pribadi secara interpersonal, pribadi, politik dan sosial ekonomi, sehingga mereka bisa memperbaiki keadaan mereka.” Konsep pemberdayaan berkaitan erat dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki individu, keluarga, kelompok dan organisasi, agar Pekerja Sosial/Lembaga pelaksana Pemberdayaan dapat menentukan tahapan intervensi yang akan dilaksanakan. Pemberdayaan berfokus pada upaya untuk meningkatkan kemampuan individu, keluarga, kelompok dan organisasi untuk memahami lingkungannya, membuat pilihan, dan bertanggung jawab dengan pilihannya melalui organisasi dan advokasi (Zaztrow 2017:68). Pernyataan-pernyataan tersebut secara tersirat menjelaskan pemberdayaan berlawanan dengan keputusasaan dan ketidakberdayaan karena berfokus

untuk meningkatkan kemampuan individu, keluarga, kelompok dan organisasi untuk mengatasi masalah mereka secara kompeten, dimulai dengan pandangan positif dari diri sendiri. Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut pemberdayaan secara langsung berfungsi untuk mengentaskan penindasan dan kemiskinan dengan meningkatkan kemampuan individu, keluarga, kelompok dan organisasi berdasarkan kekuatan yang dimiliki berdasarkan keputusan yang ditentukan oleh individu, keluarga, kelompok dan organisasi. Cox dkk (*Intoroduction to social work* 2019:127) mengemukakan bahwa *“Empowerment refers to client ability to influence decisions made about themselves, determine the best outcomes for themselves, and making life-changing decisions themleves”*

Pemberdayaan mengacu pada kemampuan klien untuk mempengaruhi keputusan, menentukan hasil terbaik dan membuat keputusan untuk mengubah hidup mereka sendiri. Pengertian tersebut menjelaskan bahwa Pemberdayaan merupakan salah satu proses perubahan untuk membantu individu, kelompok dan organisasi untuk mengakses sumber daya sehingga dapat mengontrol hidup mereka sepenuhnya. Pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, yaitu kekuasaan dan kelompok lemah, kelompok lemah yang dimaksud adalah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi, Fakir miskin, lansia dan kelompok lemah lainnya, sedangkan kekuasaan yang dimaksud merupakan kekuasaan atau penguasaan klien terhadap pilihan personal dan

keputusan hidup, kebutuhan, ide dan gagasan, layanan-layanan publik, mobilisasi sumber-sumber yang ada dalam masyarakat, aktivitas ekonomi dan reproduksi.

*“The Purpose of Community development is to re-establish the community as the location of significant human experience and the meeting human need, rather than to rely on the larger, more inhuman and less accessible structures of the welfare state the global ekonomi, bureaucracy, professional elites, and so on” (Ife, 1995:131).*

Ife dan Tesoriero menyatakan bahwa tujuan *Community development* adalah untuk membangun kembali masyarakat sebagai tempat pengalaman penting manusia, memenuhi kebutuhan manusia, dan membangun kembali struktur-struktur negara ksejahteraan, ekonomi global, birokrasi, elit profesional dan sebagainya yang kurang berperikemanusiaan dan sulit diakses. Dari pernyataan tersebut ife menyatakan bahwa *community development* merupakan suatu wadah untuk berbagi pengalaman agar masyarakat/komunitas dapat mengikuti dan memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri tanpa bergantung pada pemerintah. Ife (2006:409) menyatakan bahwa seringkali, pengembangan masyarakat dengan akar-akarnya dalam kerja sosial konvensional masih memusatkan pada tersedianya pelayanan kemanusiaan berbasis masyarakat (seperti kesehatan, perumahan, perlindungan perempuan dan rekreasi) tetapi mengabaikan basis ekonomi, dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan banyak program *community development* yang telah dilaksanakan untuk mengembangkan masyarakat lokal hanya pada satu aspek kehidupan

yang mana menimbulkan ketergantungan masyarakat akan pemberdayaan terhadap akses-akses pelayanan tersebut, namun melalaikan yang lainnya yang mana masyarakat tidak mandiri dan menjadi masyarakat yang berantung terhadap bantuan dan akses pelayanan yang instan, sehingga masyarakat hanya berkembang dalam satu aspek, tetapi kurang berkembang di aspek lainnya. Jika dikaitkan antara pernyataan oleh Ife (2006:409) masyarakat menjadi tidak berdaya, karena masyarakat mengharapkan akan disediakan akses pelayanan untuk memenuhi kebutuhan mereka dan tidak lagi memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi, sumber dan kesempatan yang dimiliki. Ife (2006:10) mengemukakan bahwa banyak orang berargumentasi bahwa pengembangan ekonomi merupakan hal utama, pengembangan spiritual dan personal merupakan hal utama yang harus dikembangkan juga, oleh karena itu mereka menyadari bahwa untuk mengembangkan suatu masyarakat tidak hanya mencakup satu aspek seperti halnya cara kerja pekerja sosial yang tidak hanya memperhatikan satu aspek tetapi memperhatikan seluruh aspek kehidupan, oleh karena itu Ife (2006:11) mengemukakan 6 dimensi *community development* yaitu:

- 1) *Social development*
- 2) *Economic development*
- 3) *Political development*
- 4) *Cultural development*

5) *Enviromental development*

6) *Personal/spiritual development*

Dimensi-dimensi tersebut merupakan hal penting dalam melakukan *community development* dimana fasilitator program *community development* tidak hanya memperhatikan satu aspek dan melalaikan ke-5 dimensi lainnya, selain itu ke-6 dimensi tersebut merupakan kriteria-kriteria masyarakat yang berdaya, namun dalam beberapa situasi tertentu tidak semua dimensi tersebut dapat dijalankan karena memiliki prioritas yang berbeda; seperti suatu masyarakat yang berdaya berkembang dalam dimensi ekonomi dan politik, dan tidak berkembang secara spiritual dan lingkungan. Masyarakat merupakan suatu tempat yang memiliki banyak budaya, kebiasaan, kebutuhan yang berbeda dan perbedaan lainnya, oleh karena itu dalam melaksanakan suatu program *community development* maka harus dilakukan assesmen untuk mengetahui kebutuhan, masalah dan potensi, serta sumber yang dibutuhkan oleh masyarakat yang menjadi sasaran. Pendapat-pendapat para ahli terkait pemberdayaan secara tidak langsung mengemukakan bahwa pemberdayaan merupakan suatu proses kegiatan untuk meningkatkan kekuatan individu, keluarga, kelompok, organisasi, dan komunitas untuk menjadi berdaya yang mampu untuk menentukan keputusan hidupnya dan bertanggung jawab dengan hidup sendiri.

## **2. Program Pemberdayaan Sosial**

Salah satu Metode Pengentasan kemiskinan yang sering digunakan oleh pemerintah adalah program Pemberdayaan Sosial, dan sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 pasal 12 tentang Kesejahteraan sosial bahwa Pemberdayaan sosial dimaksudkan untuk:

- 1) Memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri.
- 2) Meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pemberdayaan yang diberikan kepada masyarakat berbentuk peningkatan kemampuan, penggalan potensi dan sumber daya, penggalan nilai-nilai dasar, pemberian akses dan pemberian bantuan usaha (stimulan modal, peralatan usaha dan tempat usaha). Pelaksanaan Program pemberdayaan tidak lepas dari pelaku-pelaku perubahan atau pemberdayaan yang dalam hal ini adalah *Fasilitator, Enabler, Broker dan Empower*. Kegiatan Pemberdayaan tidak lepas dari ke-4 pelaku tersebut mengingat bahwa mereka memiliki porsi kerja masing-masing yang berbeda dan saling bergantung untuk pelaksanaan Program. Program pemberdayaan sosial dilaksanakan oleh pemerintah dengan tujuan pengentasan angka kemiskinan di Indonesia, dan berikut adalah beberapa bentuk program pemberdayaan sosial yang sering digunakan yaitu:

- 1) Program Kelompok Usaha Bersana

- 2) Program Kelompok Tani
- 3) Program pelatihan ketrampilan kerajinan
- 4) Program pengembangan wisata
- 5) Program Pemberdayaan Perempuan
- 6) Program Pemberdayaan Disabilitas
- 7) Program peningkatan seni dan budaya
- 8) Pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif

### **3. Program KUBE**

Kelompok Usaha Bersama atau yang disebut KUBE adalah kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh, dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga. KUBE adalah model untuk membantu orang miskin meningkatkan ekonomi keluarga mereka melalui kegiatan ekonomi. Tujuannya adalah agar anggota KUBE dapat bekerja sama dalam menyelesaikan masalah yang mereka hadapi dan memperkuat solidaritas sosial. Proses dan mekanisme penyelenggaraan KUBE, termasuk pembentukan dan pengelolaannya, harus memperhatikan faktor-faktor seperti lokasi, jenis usaha, keterampilan anggota, sumber daya alam, budaya lokal, dan motivasi anggota. Namun, perlu diperhatikan bahwa proses pembentukan KUBE harus lebih mempertimbangkan pengalaman anggota dan memberikan bantuan modal usaha yang memperkuat usaha yang sudah ada. Pemantauan dan evaluasi



KUBE juga perlu ditingkatkan agar dapat mengidentifikasi keberhasilan dan kesulitan dengan lebih baik. Selain itu, calon penerima bantuan UEP KUBE harus diverifikasi terlebih dahulu berdasarkan data fakir miskin yang ada sebelum ditetapkan sebagai penerima bantuan. Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin telah menyusun Petunjuk Teknis UEP kepada KUBE untuk meningkatkan efektivitas penanganan fakir miskin melalui pendekatan KUBE (Peraturan Ditjen PFM No. 04/4/PER/HK.02.01/06/2019).

### **2.2.3 Kajian Tentang Kemiskinan**

#### **1. Pengertian Kemiskinan**

Kemiskinan Merupakan Ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (*basic needs approach*) yang diukur odari sisi pengeluaran. Angka kemiskinan dihitung dengan menggunakan metode garis miskin (Badan Pusat Statistik, 2016). Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai sauat situasi atau kondisi yang dialami seseorang dan kelompok orang yang tidak mampu menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi. Menurut Ravallion, Kemiskinan adalah kelaparan, tidak memiliki tempat tinggal, bila sakit tidak memiliki dana untuk berobat. Pada umumnya orang yang hidup daam taraf miskin tidak dapat membaca karena tidak mampu bersekolah, tidak memiliki pekerjaan, takut menghadapi masa depan, kehilangan anak karena sakit.

Kemiskinan secara garis besar dibedakan menjadi dua, yaitu:

1) Kemiskinan Relatif

Kemiskinan Relatif dinyatakan dengan beberapa persen dari pendapatan nasional yang diterimakan oleh kelompok penduduk dengan kelas pendapatan tertentu dibandingkan dengan proporsi pendapatan nasional yang diterima oleh kelompok penduduk dengan kelas pendapatan lain juga.

2) Kemiskinan Absolut

Kemiskinan Absolut diartikan sebagai suatu keadaan dimana tingkat pendapatan absolut dari satu orang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti sandang, pangan, pemukiman, Kesehatan dan Pendidikan (Bambang Rustanto, 2015:17). Berdasarkan Konsep-konsep kemiskinan tersebut dapat disimpulkan bahwa kemiskinan merupakan suatu ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang disebabkan oleh beberapa factor diantaranya: Perbedaan geografis, jumlah penduduk dan pendapatan (PDRB), perbedaan kekayaan sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusia (Pendidikan), perbedaan peranan sector swasta dan negara, perbedaan struktur dan derajat ketergantungan pada kekuatan ekonomi politik negara lain serta perbedaan pembagian kekuasaan, struktur politik dan kelembagaan negara. Penanggulangan Masalah Kemiskinan di Indonesia belum berlangsung secara efektif karena

Indonesia masih masuk dalam kategori Negara dengan Tingkat Kemiskinan yang cukup tinggi. Salah satu Program penanggulangan Kemiskinan adalah Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang mana merupakan Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan.

## 2) Karakteristik Kemiskinan

Kotze (dalam Hikmat, 2004:6) menyatakan bahwa masyarakat miskin memiliki potensi untuk mencari sumber daya melalui peluang yang ada, namun terkadang bantuan dari luar juga diperlukan. Namun, bergantung sepenuhnya pada bantuan luar tidaklah diinginkan karena dapat menyebabkan ketergantungan. Pendekatan pemberdayaan dianggap lebih efektif karena tidak ada masyarakat yang dapat berkembang jika terisolasi. Isolasi ini dapat menyebabkan kebergantungan dan bahkan memperburuk keadaan miskin. Supriatna (1997:90) menjelaskan bahwa kemiskinan adalah situasi terbatas yang tidak disengaja. Seseorang dianggap miskin jika memiliki rendahnya pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan, dan kesejahteraan, menciptakan lingkaran ketidakberdayaan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia, termasuk pendidikan, yang akhirnya mempengaruhi pendidikan informal. Emil Salim (dalam Supriatna, 1997: 82) menunjukkan lima karakteristik penduduk miskin: mereka tidak memiliki faktor produksi sendiri, sulit untuk memperoleh aset produksi, tingkat pendidikan rendah, dan seringkali kurangnya akses fasilitas.

Suharto menyatakan bahwa kemiskinan di bagi menjadi beberapa karakteristik (2005:132) yaitu:

- (1) Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (Pangan, sandang dan papan).
- (2) Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (keehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi).
- (3) Ketiadaan jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga).
- (4) Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun massal.
- (5) Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan sumber daya alam.
- (6) Ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat.
- (7) Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinabungan.
- (8) Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fiik maupun mental.
- (9) Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak terlantar, wanita korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marjinal dan terpencil).

### 3) Dimensi Kemiskinan

Secara luas David Cox (2004:1-6 dalam Suharto 2005: 132-133) membagi kemiskinan dalam beberapa dimensi sebagai berikut:

(1) Kemiskinan yang diakibatkan globalisasi

Globalisasi menghasilkan pemenang dan yang kalah. Pemenang umumnya adalah negara-negara maju dan negara-negara berkembang sering terpinggirkan oleh persaingan dan pasar bebas yang merupakan prasyarat globalisasi.

(2) Kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan.

Kemiskinan subsisten (kemiskinan akibat rendahnya pembangunan), kemiskinan pedesaan (Kemiskinan akibat peminggiran pedesaan dalam proses pembangunan), kemiskinan perkotaan (kemiskinan yang disebabkan oleh hakekat dan kecepatan pertumbuhan perkotaan). Kemiskinan sosial adalah kemiskinan yang dialami oleh perempuan, anak-anak, dan kelompok minoritas, dan Kemiskinan konsekuensial adalah kemiskinan yang terjadi akibat kejadian-kejadian lain atau faktor-faktor eksternal diluar penyebab internal, seperti konflik, bencana alam, kerusakan lingkungan, dan tingginya jumlah penduduk. Konsep kemiskinan yang berifat dimensional dapat digunakan sebagai alat untuk menganalisis dan merumuskan kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Kedekatan antara konsep kemiskinan dan prespektif pekerjaan sosial memfokuskan pada konsep keberfungsian sosial dan senantiasa melihat manusia dalam konteks lingkungan dan situasi sosial.

- 4) Konsep garis kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dikategorikan menjadi tiga:
- (1) Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) untuk mengetahui jumlah penduduk miskin
  - (2) Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kg kalori perkapita perhari.
  - (3) Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya (BPS, 2020)

#### **2.2.4 Kajian Tentang Pekerjaan Sosial dengan Kemiskinan**

##### **1. Pengertian Pekerjaan Sosial**

Profesi pekerjaan sosial secara singkat diartikan suatu bentuk pertolongan bagi individu, kelompok dan masyarakat dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapinya. Dalam hal ini, pertolongan yang dimaksud adalah secara ilmiah, professional dan objektif. Menurut Asosiasi Nasional Pekerja Sosial Amerika Serikat (NASW) dalam Adi Fahrudin (2012: 60) pekerjaan sosial dirumuskan sebagai berikut “*Social work is the professional activity of helping individuals groups or communities to enhance*

*a restore their capacity for social functioning and to create societal conditions favorable to their goals”.*

Pekerjaan sosial adalah kegiatan profesional membantu individu, kelompok atau masyarakat untuk meningkatkan atau memulihkan kemampuan mereka berfungsi sosial dan untuk menciptakan kondisi sosial yang mendukung tujuan-tujuan ini. Pekerjaan sosial menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerjaan Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi. Praktik pekerjaan sosial dalam UU No.14 tahun 2019 tentang Pekerjaan Sosial adalah penyelenggaraan pertolongan profesional yang terencana, terpadu, berkesinambungan, dan tersupervisi untuk mencegah disfungsi sosial, serta memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.

Chales Zastrow (2017:5) mendefinisikan pekerjaan sosial sebagai berikut: *“Social work is the professional activity of helping individuals, groups, or communities to enhance or restore their capacity for social functioning and to create societal conditions favorable to their goals”* (dalam Sukoco, 2021: 14). Definisi tersebut menyatakan bahwa pekerjaan sosial merupakan “Kegiatan profesional untuk membantu individu, kelompok, dan masyarakat dengan tujuan guna meningkatkan atau

memperbaiki kemampuan mereka dalam berfungsi sosial serta menciptakan kondisi masyarakat yang memungkinkan mereka mencapai tujuan (Sukoco, 2021:14).” Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa profesi pekerja sosial merupakan suatu aktivitas profesional yang berfokus untuk membantu individu, kelompok, masyarakat untuk memecahkan masalah mereka, dan dapat melaksanakan keberfungsian sosial mereka dengan sebagaimana mestinya. Lingkup praktik pekerja sosial tidak hanya berhadapan dengan sosial, namun berhubungan dengan berbagai aspek kehidupan, yaitu kebudayaan, kesehatan, kelembagaan, industri dan kemiskinan. Salah satu praktik pekerjaan sosial yang sedang diusahakan terus berjalan mengingat angka/persentase masalahnya yang cukup tinggi yaitu Kemiskinan. Praktik Pekerjaan sosial dengan kemiskinan berfokus untuk menangani masyarakat kurang mampu yang tidak berdaya dan tidak mampu untuk mengakses sumber yang ada disekitarnya. Soetarso (1992:6 dalam Rustanto 2015:13) mengemukakan dimana pekerja sosial melaksanakan tugas-tugas menyelesaikan satu atau lebih fungsi praktik pekerjaan sosial, antara lain:

- 1) Membantu orang untuk meningkatkan dan menggunakan secara lebih efektif kemampuan mereka dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan mereka untuk melaksanakan kehidupan mereka dan memecahkan masalah mereka.



- 2) Menciptakan jalur hubungan pendahuluan diantara orang dengan sistem sumber.
- 3) Mempermudah interaksi, mengubah, dan menciptakan hubungan di antara orang di lingkungan dengan sistem sumber kemasyarakatan.
- 4) Mempermudah interaksi, mengubah dan menciptakan hubungan di antara orang-orang di lingkungan sistem sumber.
- 5) Memberikan sumbangan bagi perubahan, perbaikan dan perkembangan kebijakan dan perundang-undangan sosial.
- 6) Meratakan sumber-sumber material.
- 7) Bertindak sebagai kontrol sosial.

Dalam melaksanakan tugas-tugas menangani masalah kemiskinan maka pekerja sosial dibekali keterampilan praktik pekerjaan sosial Soetarso (1992:97 dalam Rustanto 2015:13) yaitu:

- 1) Pengukapan dan pemahaman masalah
- 2) Pengumpulan data
- 3) Mengadakan kontrak pendahuluan
- 4) Membicarakan kontrak
- 5) Membentuk sistem kegiatan
- 6) Memantapkan dan mengkoordinasikan sistem kegiatan
- 7) Memberikan pengaruh
- 8) Menghentikan usaha perubahan

Suharto (2017:148) menyatakan bahwa Pekerjaan sosial memandang bahwa kemiskinan merupakan persoalan-persoalan multidimensional, yang bermantra ekonomi-sosial dan individual-struktural. Berdasarkan prespektif ini, ada tiga kategori kemiskinan yang menjadi pusat perhatian pekerjaan sosial, yaitu:

- 1) Kelompok yang paling miskin (*destitute*) atau yang sering didefinisikan sebagai fakir miskin. Kelompok ini secara absolut memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan (umumnya tidak memiliki sumber pendapatan sama sekali) serta tidak memiliki akses terhadap berbagai pelayanan sosial.
- 2) Kelompok miskin (*poor*). Kelompok ini memiliki pendapatan dibawah garis kemiskinan namun secara relatif memiliki akses terhadap pelayanan sosial dasar (misalnya, masih memiliki sumber-sumber finansial, memiliki pendidikan dasar dan tidak buta huruf).
- 3) Kelompok Rentan (*Vulnerable group*). Kelompok ini dapat dikategorikan bebas dari kemiskinan, karena memiliki kehidupan yang relatif lebih baik ketimbang kelompok *destitute* maupun miskin. Namun sebenarnya kelompok yang sering disebut “*near poor*” (agak miskin) ini masih rentan terhadap terhadap berbagai perubahan sosial di sekitarnya. Mereka seringkali berpindah status “rentan” menjadi “miskin” dan

bahkan “*destitute*” bila terjadi krisis ekonomi tidak mendapat pertolongan sosial.

## **2. Tujuan Pekerjaan Sosial**

Pekerjaan sosial berusaha untuk membantu orang dalam pemecahan masalah dan meningkatkan kemampuan berfungsi sosialnya untuk menciptakan kondisi masyarakat yang dapat mencapai tujuannya yaitu kesejahteraan sosial. Menurut Zastrow dalam Fahrudin (2012:66) tujuan pekerjaan sosial adalah:

- 1) Meningkatkan kesejahteraan manusia dan mengurangi kemiskinan, penindasan dan bentuk-bentuk ketidakadilan sosial lainnya.
- 2) Mengusahakan kebijakan, pelayanan dan sumber-sumber melalui advokasi dan tindakan-tindakan sosial dan politik yang meningkatkan keadilan sosial dan ekonomi.
- 3) Mengembangkan dan menggunakan penelitian, pengetahuan, dan ketrampilan yang memajukan praktik pekerjaan sosial.
- 4) Mengembangkan dan menerapkan praktik dalam konteks budaya yang bermacam-macam.

## **3. Fungsi Pekerjaan Sosial**

Pekerjaan sosial adalah satu diantara kegiatan dalam pemberian pelayanan sosial (*social selvice*). Pelayanan sosial memiliki bermacam-

macam bentuk sesuai dengan fungsi-fungsinya sebagaimana dikemukakan Max Siporin (1975) dalam Huraerah (2013:39), yaitu:

- 1) Pelayanan akses (*access service*), mencakup pelayanan informasi, rujukan, advokasi dan partisipasi. Tujuannya membantu orang agar bisa mencapai atau menggunakan pelayanan-pelayanan yang tersedia.
- 2) Pelayanan terapis, pertolongan dan rehabilitasi, termaksud didalamnya perlindungan dan perawatan pengganti, seperti pelayanan yang diberikan oleh badan-badan yang menyediakan konseling, pelayanan kesejahteraan anak, pelayanan pekerjaan sosial dan medis dan sekolah, program-program koreksional, perawatan bagi orang-orang lanjut usia (jompo), dan sebagainya.
- 3) Pelayanan sosialisasi dan pengembangan, seperti tempat penitipan bayi atau anak, KB (Keluarga Berencana), pendidikan keluarga, pelayanan rekreasi bagi pemuda, pusat kegiatan masyarakat, dan sebagainya.

#### **4. Prinsip dalam Pekerjaan Sosial**

Menurut Felix P. Biestek dalam Johnson (1983), terdapat tujuh prinsip dalam pekerjaan sosial, berikut ini penjelasannya:

- 1) Individualisasi (*individualization*) Setiap individu adalah unik, memiliki dan mengakui bahwa setiap orang mempunyai harkat dan martabat, harga diri, pengalaman hidup, lingkungan hidup yang berbeda dengan individu lain. Pekerja sosial menggunakan prinsip ini ketika keberfungsian sosial

dari sudut prasangka, tanpa bias, ketika menerapkan pengetahuan tentang perbedaan manusia, ketika empati terhadap kelayan dan ketika mendengarkan dan mengamati untuk memahami kelayaan secara lebih baik.

- 2) Pengungkapan perasaan secara bertujuan (*purposefull expression of feelling*) Setiap individu memiliki kebutuhan untuk mengekspresikan perasaannya. Emosi (negative dan positif) dipandang sama pentingnya dengan pikiran dan pengetahuan.
- 3) Keterlibatan emosional secara terkendali (*controlled emotional involvement*) Pekerja sosial harus mampu untuk ikut „merasakan orang lain. Pekerja sosial harus mampu menunjukkan pemahaman yang sungguh-sungguh tentang perasaan orang lain.
- 4) Penerimaan (*acceptance*) Menerima keadaan kelayaan apa adanya dengan segala kelebihan dan kekurangan serta dengan potensi yang dimilikinya, dan memahaminya pada keadaan saat itu. Hal ini identic dengan pekerja sosial menyetujui segala sesuatu yang dilakukan kelayan.
- 5) Sikap tidak menghakimi (*nondjudgmental*) Kelayan mempunyai hak untuk mengemukakan situasi yang dihadapi tanpa negatif dari pekerja sosial, artinya pekerja sosial tidak memberikan penilaian pribadi terhadap perilaku kelayanan. Hal yang penting adalah pekerja sosial mengetahui mengapa kelayana mempunyai masalah yang sedang dihadapinya.

- 6) Menentukan diri sendiri (*self determination*) Pekerja sosial hanya sebatas memberikan pertolongan, nasehat dan pekerja sosial bersama kelayan mengembangkan alternatif pilihan dalam memecahkan masalah yang paling sesuai dan yang menentukan pilihan pada kelayan itu sendiri.
- 7) Kerahasiaan (*confidentiality-privacy client*) Kelayan memerlukan pekerja sosial yang dapat dipercaya dan pekerja sosial tidak dibenarkan membicarakannya kepada orang lain, sebenarnya kerahasiaan itu sifatnya adalah absolut dan juga relative.

## **5. Sistem sumber dalam Pekerjaan Sosial**

Sistem Sumber Kesejahteraan Sosial menurut Allen Pincus dan Anne Minahan (1973) terdapat tiga jenis yaitu:

### 1) Sumber informal atau alamiah (*informal or natural resources*)

Sistem sumber informal atau alamiah dapat berupa keluarga, teman, tetangga, maupun orang lain yang bersedia membantu. Bantuan yang dapat diperoleh dari sumber alamiah adalah dukungan emosional, kasih sayang, nasehat atau motivasi, informasi dan pelayanan-pelayanan konkrit lainnya seperti pinjaman uang dan jasa.

### 2) Sumber formal (*formal resources*)

Sistem sumber formal adalah keanggotaannya di dalam suatu organisasi atau asosiasi formal yang bertujuan meningkatkan minat anggota

mereka. Sistem sumber tersebut juga dapat membantu anggotanya untuk bernegosiasi dan memanfaatkan sistem sumber kemasyarakatan atau societal.

### 3) Sumber kemasyarakatan (*societal resources*)

Sumber kemasyarakatan adalah lembaga-lembaga yang didirikan baik oleh pemerintah atau atas partisipasi dan dukungan dari masyarakat untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Sistem sumber kemasyarakatan ini berupa rumah sakit, badan-badan adopsi, sekolah, karang taruna, kelompok pengajian, tempat penempatan tenaga kerja, dan juga terkait dengan badan-badan pemerintah dan pelayanan-pelayanan umum lainnya seperti, perpustakaan umum, kepolisian, tempat rekreasi dan pelayanan perumahan.

## **2.2.5 Kajian Tentang Program KUBE**

### 1. Pengertian Program KUBE dan Tujuan Program KUBE

Kelompok Usaha Bersama yang selanjutnya disebut KUBE adalah kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh, dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Pemberian UEP kepada KUBE bertujuan untuk penguatan kapasitas fakir miskin dalam meningkatkan pendapatan dan kemampuan berusaha sehingga mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri serta meningkatkan kesetiakawanan sosial. Permensos Nomor 2 Tahun

2019 menjadi landasan hukum yang mengatur pelaksanaan Program KUBE. Kebijakan ini dirancang untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional, khususnya dalam bidang kesejahteraan sosial, dengan fokus pada pemberdayaan keluarga miskin melalui pendekatan kelompok usaha bersama.

Program KUBE dirancang dengan tujuan untuk:

- 1) Mengurangi angka kemiskinan melalui peningkatan pendapatan keluarga miskin.
- 2) Memfasilitasi pengembangan usaha ekonomi produktif di kalangan masyarakat miskin.
- 3) Membangun dan memperkuat jaringan sosial serta solidaritas di antara anggota KUBE.
- 4) Meningkatkan keterampilan dan kapasitas kewirausahaan dari para peserta program.

## 2. Kriteria Sasaran Program

Jumlah anggota KUBE paling sedikit 5 (lima) kepala keluarga dan paling banyak 20 (dua puluh) kepala keluarga. KUBE dibentuk dengan kriteria; mempunyai potensi, kemauan, dan kemampuan untuk mengembangkan usaha bersama, mempunyai jenis usaha dan tinggal di wilayah desa/kelurahan/nama lain dalam kecamatan yang sama, serta mempunyai keterbatasan akses terhadap pasar, modal, dan usaha.



### 3. Komponen utama Program KUBE

Permensos Nomor 2 Tahun 2019 menunjukkan bahwa terdapat beberapa komponen utama yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan Program KUBE:

- 1) Pembentukan dan Pengelolaan KUBE: Pembentukan KUBE harus melalui proses partisipatif yang melibatkan anggota masyarakat miskin sebagai pelaku utama. Pengelolaan KUBE juga harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada keberlanjutan usaha.
- 2) Pendampingan: KUBE mendapat pendampingan dari fasilitator atau pendamping sosial yang bertugas untuk membantu kelompok dalam merencanakan, menjalankan, dan mengembangkan usaha mereka.
- 3) Modal Usaha: KUBE diberikan bantuan modal usaha dari pemerintah yang harus digunakan secara efektif untuk menjalankan kegiatan usaha produktif.
- 4) Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas: Anggota KUBE menerima pelatihan kewirausahaan, manajemen usaha, dan keterampilan teknis yang relevan dengan jenis usaha yang dijalankan.

### 4. Dampak yang diharapkan

Dari perspektif Permensos Nomor 2 Tahun 2019, KUBE diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan dalam:

- 1) Pengurangan Kemiskinan: Melalui peningkatan pendapatan rumah tangga miskin.
- 2) Penguatan Modal Sosial: Dengan meningkatkan kerjasama dan solidaritas di antara anggota kelompok.
- 3) Peningkatan Kesejahteraan Sosial: Dengan membuka akses yang lebih luas terhadap peluang ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup peserta program.

Permensos Nomor 2 Tahun 2019 memberikan panduan yang jelas dan komprehensif dalam pelaksanaan Program KUBE, dengan penekanan pada partisipasi, pemberdayaan, dan keberlanjutan usaha. Tujuan akhirnya adalah untuk memastikan bahwa program ini benar-benar mampu memberdayakan masyarakat miskin dan membawa perubahan yang signifikan dalam kesejahteraan mereka.

### **2.3 Kerangka Pemikiran**

Uma sekaran dalam buku *Business reseach* (1992 dalam Sugiyono 2018:95) mengemukakan bahwa kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhuungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting. Kerangka pemikiran yang baik menjelaskan secara teoritis variabel efektivitas dan dirumuskan dalam bentuk paradigma penelitian. Berikut adalah kerangka pemikiran Efektivitas Program KUBE di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat yaitu:

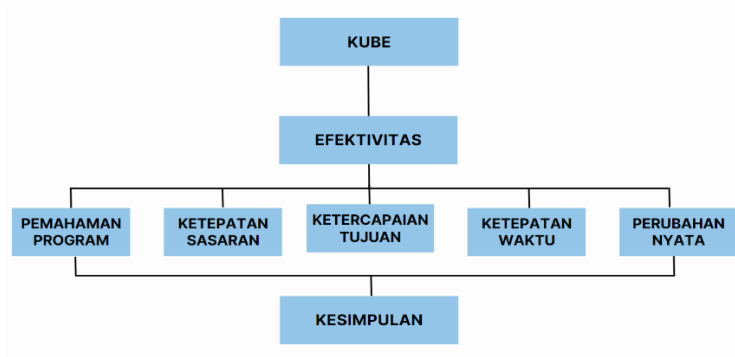


Diagram 2. 1 Kerangka Pemikiran  
Sumber: Penelitian 2024